



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagian besar tulisan sejarah Sulawesi Selatan membahas tentang sejarah politik yang menggambarkan kehidupan para raja dan penguasa pribumi. Namun tidak banyak yang melihat bagaimana kehidupan dari penguasa masa kolonial yaitu pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada saat Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern, pejabat Belanda khususnya pejabat administrasi atau *Binnenlands Bestuur* (BB) melahirkan dinamika aspek kehidupan yang cukup beragam. Kehidupan sehari-hari *Binnenlands Bestuur* tetap mempertahankan budaya asal mereka di Eropa. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus tetap menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat lokal tempat mereka bekerja.

Sebelum menerapkan sistem pemerintahan modern di Sulawesi Selatan, Belanda awalnya melakukan pasifikasi politik atau desentralisasi penguasa lokal diantara tahun 1905-1906. Meskipun secara harfiah politik pasifikasi berarti politik pendamaian. Namun, dalam pelaksanaannya Belanda ingin menguasai secara penuh seluruh wilayah Hindia Belanda yang telah dipandang secara *de jure* berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda, meski secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat.<sup>1</sup> Politik ini dilakukan melalui ekspedisi

---

<sup>1</sup> Muhammad Amir. 2018. “Perlawanan Sawitto Terhadap Belanda di Sulawesi Selatan Pada 1905-1906”. *Walasuji Volume 9, Nomor 1* hlm. 8



militer yang dikenal dengan peristiwa *Expeditie Militair Zuid Celebes* (Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan). Melalui aksi militer Belanda tersebut alhasil dua kerajaan berpengaruh di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Gowa dan Bone harus dipaksa tunduk menandatangani *korte verklaring* atau perjanjian pendek.

Setelah para penguasa lokal kehilangan kendali penuhnya di wilayah kekuasaannya, maka dalam konsep pemerintahan Belanda para kerajaan tersebut diberi status kerajaan sekutu.<sup>2</sup> Meskipun demikian, memulihkan kedamaian di daerah ini bukanlah hal yang mudah bagi Belanda. Kemenangan Belanda dalam ekspedisi militer di tahun 1905 merupakan peristiwa kelam bagi beberapa kalangan bangsawan di Sulawesi Selatan. Akibatnya, tak jarang perlawanan dengan niat balas dendam terjadi di berbagai pelosok. Perlawanan tersebut berupa pencurian ternak, gerombolan perampok, dan perlawanan politik.<sup>3</sup> Gerakan ini dilakukan oleh bangsawan untuk menunjukkan kemampuan, keberanian, dan kekuasaannya.<sup>4</sup> Hilangnya reputasi bangsawan tersebut membuatnya terpaksa harus melakukan gerakan ini.

---

<sup>2</sup> Edward L. Poelinggomang. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. (Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2005) hlm. 14

<sup>3</sup> S. L. Van der Wal. *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Djambatan Anggota IKAPI, 2001) hlm. 50

<sup>4</sup> Amrullah Amir. 2011. "Melihat Sejarah Sosial di Makassar Melalui Roman dan Cerpen Karya H. J. Friedericy". *Passumpeugi*



Lantas, Belanda menindaki hal tersebut dengan cara gerakan militer. Melalui bantuan pasukan dari Jawa atas usul mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Coenen, dan kemudian menyerbu para pemberontak di berbagai pelosok.<sup>5</sup> Pada tanggal 18 November 1915 penyerbuan dilakukan oleh tentara Belanda serta dibantu oleh ratusan penduduk lokal berhasil memukul mundur para pemberontak hingga di wilayah persembunyian terakhirnya. Ketika para pemberontak berhasil direda barulah pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan benar-benar dilakukan. Meskipun gerakan-gerakan dari gerombolan pemberontak masih terjadi di beberapa pelosok pada tahun-tahun berikutnya.

Hilangnya hegomoni penguasa lokal menjadi sebuah keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda. Belanda memegang penuh pemerintahan di Sulawesi Selatan dan kemudian membentuk sistem pemerintahan modern dan membagi teritorial berdasarkan wilayah administratif yaitu *afdeeling*, *onderafdeeling*, *adatgemeenschap*, dan *kampong*.<sup>6</sup> Untuk cabang pemerintahan *afdeling* dan *onderafdeeling* dipimipin langsung oleh pejabat Belanda yaitu *assistant resident* untuk wilayah *afdeling* dan *controleur* untuk wilayah *onderafdeeling*. Sedangkan

---

<sup>5</sup> S. L. Van der Wal., *Op.Cit.*, hlm. 51

<sup>6</sup> Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. (Jakarta: Nalar Bekerja Sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2006) hlm. 324



untuk tingkat daerah dipimpin langsung oleh pejabat bumiputra yaitu *regent* untuk wilayah *adatsgemeenschap* dan *hoofd* untuk wilayah *kampong*.<sup>7</sup>

Pada tahun 1909, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang reorganisasi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Melalui keputusan ini, Sulawesi Selatan dibagi menjadi dua *afdeelingen*, yakni *afdeeling* Makassar dan Bonthain. Kedua *afdeeling* ini masing-masing dibagi menjadi lima *onderafdeeling*. *Afdeeling* Makassar terdiri dari *onderafdeeling* Makassar, Pangkadjene, Maros, West-Goa dan Takalar. Sedangkan *afdeeling* Bonthain terdiri dari *onderafdeeling* Bonthain, Djeneponto, Boeloekoemba, Sindjai, dan Saleier.<sup>8</sup>

Kemudian mengalami pemekaran lagi pada tahun 1911 menjadi tujuh *afdeeling* yaitu Makassar, Bonthain, Boni, Pare-Pare, Mandar, Loewoe, dan Oost-Celebes. *Afdeeling* Makassar (Makassar) dibagi menjadi lima *onderafdeeling*, yakni: (1) *Onderafdeeling* Makassar yang membawahi distrik Makassar, Wadjo, Endeh, Malajoe, Oedjoengtanah dan Mariso serta pulau-pulau di sekitarnya. (2) *Onderafdeeling* Pangkadjene. (3) *Onderafdeeling* Maros yang terdiri dari distrik Tjamba, Malawa, Tjenrana, Laija, Gantarang Matinggi, Maros, Tanralili, Toerikale-landen, Ri Laoe, Bontoa, Bira, Biringkanaja, Montjongloe dan Soediang

---

<sup>7</sup> Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004) hlm. 4

<sup>8</sup> Ismail Syawal. 2023. "Dari Onderafdeling Hingga Terbentuknya Kabupaten Jeneponto (1909-1959)". *Moderasi: Jurnal Pengetahuan Sosial* Vol. 4, No. 1 hlm. 9



di bawah seorang Controleur yang berkedudukan di Maros. (4) *Onderafdeeling* WestGoa, terdiri dari distrik Goa dengan delapan *onderdistrict*, yakni Karuwisi, Mangasa, Tombolo, Borongloe, Patalasang, Borisallo, Manoedjoe dan Parigi, semuanya diperintah oleh seorang *Civiel Gezaghebber* yang bertempat di Soenggoeminasa. (5) *Onderafdeeling* Takalar terdiri dari distrik Takalara, Topedjawa, Polombangken, Lamabone, Galeson, Papa, Lengkesse, Lakatong, Bontonompo, Montjobalang, dan Limbung. Sedangkan Afdeeling Bonthain (Bantaeng) dibagi menjadi lima *Onderafdeeling*, yakni *Onderafdeeling* Bonthain, Djeneponto, Boeloekoemba, Sindjai, dan Saleier. *Onderafdeeling* Bonthain dibagi menjadi tiga distrik yaitu Bonthain, Taroang dan Malakadji. *Onderafdeeling* Djeneponto dibagi empat distrik, diantaranya Laikang, Bangkala, Binamoe dan Aroengkeke di bawah seorang *Civiel Gezaghebber*. Sedangkan *Onderafdeeling* Boeloekoemba terdiri atas distrik Boeloekoemba Toa, Gantarang, Oedjoengloe, Kindang, Bira dan Kadjang di bawah seorang Controleur. (4) *Onderafdeeling* Sindjai dibagi atas distrik Oost-Boelo-Boelo, Lamati, Tondong, West Boelo-Boelo, Manipi dan Toeroengan, Manimpahpi dan Pao.<sup>9</sup>

Sejak diterapkannya sistem pemerintahan modern tersebut kehidupan di Sulawesi Selatan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Mapanannya kekuasaan Belanda tersebut menghadirkan dua kekuatan baru dalam dinamika politik. Pertama adalah kekuatan Pemerintah Belanda yang memiliki kekuasaan absah. Kedua kelompok bangsawan baik yang terlibat dalam pemerintahan maupun tidak yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 10



memiliki kekuasaan yang nisbi.<sup>10</sup> Meskipun secara politik keduanya memiliki status yang berbeda namun, realita dalam kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri bahwa mereka hidup dengan berdampingan. Diluar kepentingan politik, pejabat Pemerintahan Belanda faktanya tetap berinteraksi dengan masyarakat pribumi karena pertemuan dalam kehidupan sosial di ruang publik.<sup>11</sup>

Meskipun kenangan peristiwa 1905 masih membekas dalam memori bangsawan lokal, malahan peristiwa tersebut melahirkan sebuah konflik dalam kelas bangsawan itu sendiri. Mappanyukki, Karaeng Kalobokang, dan Karaeng Langkese ketiganya merupakan sosok bangsawan Gowa yang turut terlibat dalam meredam aksi pemeberontakan yang dilakukan oleh bangsawan lainnya.<sup>12</sup> Maka, timbul pertanyaan besar tentang realita yang sebenarnya mengenai relasi antara Belanda dan bangsawan. Pada bulan Oktober 1945 seorang mantan *Binnenlands Bestuur* Sulawesi Selatan bernama H. J. Koerts mengunjungi Mangi-Mangi Karaeng Bontonompo di istananya. Karaeng Bontonompo menunjukkan luka bekas peluru senapan dibahunya sembari berkata “Walaupun ada ini, selamanya saya setia

---

<sup>10</sup> *Op. Cit.*, Poelinggomang, hlm. 14

<sup>11</sup> Agung Wibowo. *Gaya Hidup Masyarakat Eropa Di Batavia Pada Masa Depresi Ekonomi Tahun 1930-1939*. (Depok: Universitas Indonesia, 2012) hlm.

<sup>12</sup> Amrullah Amir., *Op.Cit.*



kepada Kompeni”.<sup>13</sup> Selanjutnya, pada tahun 1955, Koerts dalam percakapannya dengan Andi Mappanyukki tidak menunjukkan adanya dendam pada peristiwa 1905 itu. Bahkan ia kurang senang ketika Presiden Sukarno menghapuskan pemerintahan swapraja.<sup>14</sup>

Pernyataan dari kedua bangsawan tersebut menunjukkan sebuah indikasi tentang hidup berdampingan antara Belanda dengan bangsawan. Kemudian diperkuat lagi oleh fakta sejarah mengemukakan bahwa bagi bangsawan yang lebih memilih untuk koperatif dengan Pemerintah Belanda akan dirangkul dan diperbaiki kedudukannya.<sup>15</sup> Selanjutnya, pada tahun 1926, seorang *controleur* wilayah administrasi Gowa bernama Herman Jan Friedericy (1925-1928) sering dikunjungi oleh bangsawan Gowa bernama Boente Karaeng Mandalle yang telah lanjut usia. Keduanya sering melakukan percakapan di kediaman Friedericy di Sungguminasa. Tak jarang karaeng tersebut menceritakan tentang keluarganya dan sejarah Kerajaan Gowa.<sup>16</sup>

Kehidupan harmonis antara bangsawan lokal dengan Pemerinah Belanda semakin kontras pada saat A. J. L. Couvreur menjadi Gubernur *Zuid-Celebes* (1924-

---

<sup>13</sup> S. L. van der Wal. *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Djambatan Anggota IKAPI, 2001) hlm. 49

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 49

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, Poelinggomang, hal 194.

<sup>16</sup> Friedericy, Herman Jan. *De Eerste Etappe*. (Amsterdam: Querido, 1961) hlm. 162



1929). Ia mengupayakan pemerintahan sejalan dengan hubungan tradisional masyarakat pribumi. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kekuasaan tradisional para bangsawan di wilayahnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pada tanggal 13 September 1926, Gubernur Couvreur mengangkat seorang bangsawan murni Kerajaan Gowa menjadi Karaeng Karoewisi bernama Tjoneng Daeng Matajang Karaeng Mandjalling.<sup>18</sup> Langkah awal tersebut menjadi titik awal terjalannya hubungan yang lebih kondusif antara bangsawan dengan Belanda.

Untuk melacak lebih jauh kehidupan yang berdampingan ini pejabat Pemerintahan Belanda yang bersentuhan langsung dengan pejabat bumiputra dan masyarakat lokal adalah melalui *controleur*. Misalnya pelantikan Karaeng Karoewsi dinominasikan oleh Friediricy -*Controleur Sungguminasa* melalui perbincangannya dengan bangsawan lainnya dan kemudian dilantik oleh gubernur. Seorang *controleur* dalam melaksanakan pekerjaannya memang hidup langsung di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu seorang *controleur* harus mempelajari masyarakat dan adat istiadat dari wilayah tempat ia ditugaskan.<sup>19</sup> Karena melalui

---

<sup>17</sup> Berg Joop, Van den. *In Indie Gewest: Maria Dermount, H.J. Friedericy, Beb Vuyk*. (Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum Documentatiecentrum, 1990) hlm. 63

<sup>18</sup> *Op. Cit.*, Friedericy, hlm. 179

<sup>19</sup> *Op. Cit.*, Berg Joop, hlm. 63



pemahaman yang cukup terkait nilai sosial masyarakat dapat menopang efektivitas kerjanya.<sup>20</sup>

Selain hubungan dengan kelas bangsawan, kehidupan sehari-hari dengan penduduk lokal tak dapat terlepas. Kebebasannya dalam berinteraksi dengan penduduk lokal melahirkan sebuah hubungan yang berbeda dengan pejabat kolonial lainnya. Bahkan kedua golongan tersebut tak jarang merayakan hari besar bersama-sama. Sehingga kehidupan tersebut menimbulkan adanya pertukaran budaya yang sebelumnya tidak dikenal oleh baik itu pejabat Belanda dan penduduk lokal. Seperti perayaan tahun baru yang bukan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi sebuah kebiasaan baru.

Dalam perayaan tahun baru misalnya di Sungguminasa tahun 1925, sebuah perayaan tahun baru dilakukan di rumah Friedericy yang dihadiri oleh bangsawan dan penduduk lokal berjumlah lebih dari dua ratus orang.<sup>21</sup> Di atas meja disediakan kue-kue khas Makassar, air perasan limun, dan cerutu. Ketiga suguhan tersebut menariknya adalah mewakili masing-masing mewakili dari dua budaya yang jauh berbeda tersebut. Selain merayakan tahun baru, *controleur* juga seringkali mendapat undangan untuk menghadiri sebuah kompetisi perburuan rusa dan

---

<sup>20</sup> Harto Juwono. 2023. "Dari Petugas Pertanahan Menjadi Kepala Pemerintahan: Kontrolir Di Hindia Belanda Abad XIX". *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol. 14, No. 2* hlm. 193

<sup>21</sup> *Op.Cit.*, Friedericy hlm. 159



pernikahan penduduk lokal. Kedua acara tersebut juga menjadi sebuah hal yang baru bagi pejabat *controleur*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dalam penelitian bertujuan untuk membahas kehidupan sehari-hari masyarakat kolonial di Sulawesi Selatan terutama kehidupan pegawai pemerintahan kolonial baik berkebangsaan Belanda maupun warga pribumi. Kehidupan yang dimaksud disini adalah aspek sosial, hukum, dan kehidupan sehari-hari *Binnenlands Bestuur* khususnya *Controleur* sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Belanda dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Olehnya, penulis memberi judul penelitian ini dengan **Kehidupan *Ambtenaar* Di Sulawesi Selatan Tahun 1905 - 1942**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan sehari-hari antara *Ambtenaar* dengan bangsawan lokal di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana kehidupan sehari-hari antara masyarakat lokal dengan *Ambtenaar* di Sulawesi Selatan?

## 1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian sejarah terdapat dua batasan penelitian yang perlu ditentukan. Batasan tersebut yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Olehnya, batasan temporal dalam penelitian ini yaitu dari tahun 1905 hingga tahun 1942. Sedangkan batasan spasial yang ditentukan adalah Sungguminasa.

Tahun 1905 – 1942 merupakan periode masif nya kehidupan kolonial di Nusantara termasuk Sulawesi Selatan. Pada aspek sosial, periode ini menunjukkan



dinamika yang cukup beragam dan menjadi titik pentingnya peristiwa kolonial di Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan perkembangan sistem pemerintahan birokrasi kolonial sehingga meningkatnya jumlah pejabat kolonial di Sulawesi Selatan. Sehingga kehadiran mereka melahirkan sebuah relasi antara pejabat kolonial dengan bangsawan dan masyarakat lokal.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berikut tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kehidupan sosial masyarakat di Sulawesi Selatan yaitu antara *Binnenlands Bestuur* dengan bangsawan dan masyarakat lokal.
2. Untuk mengetahui dinamika kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan kolonial melalui sudut pandang *Binnenlands Bestuur* khususnya *controleur*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya historiografi lokal dan nasional Sulawesi Selatan khususnya sejarah sosial pada masa kolonial.
2. Memberikan sumbangsih terhadap narasi sejarah Sulawesi Selatan khususnya tema sejarah sosial.
3. Dapat menjadi referensi dan dikembangkan bagi penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.



## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Penelitian Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, sumber kepustakaan maupun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian sangatlah penting. Kajian sebelumnya yang membahas tentang pemerintahan ataupun pejabat Belanda di Sulawesi Selatan pada masa kolonial telah beberapa kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Mayoritas dari kajian tersebut membahas dengan melakukan pendekatan sejarah politik dengan menggunakan sudut pandang penguasa lokal seperti perlawanan, pemberontakan, dan stratifikasi sosial. Namun, belum ada yang mengkaji tentang kehidupan sosial sehari-hari antara pejabat Belanda dengan penduduk lokal melalui kacamata kolonial khususnya di Sulawesi Selatan.

Usaha menghindari kerancuan objek studi serta memperkaya materi penulisan, maka penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, artikel, dan skripsi. Sumber pustaka pertama adalah buku karya Edward L. Poelinggomang dengan judul *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*.<sup>22</sup> Karya ini menggambarkan tentang bagaimana perubahan politik dan hubungan kekuasaan pada pelaksanaan pemerintahan yang terjadi di wilayah bagian pemerintahan Makassar pada tahun 1906-1942.

Berdasarkan karya tersebut peralihan sistem pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan modern atas inisiasi Belanda menimbulkan kekacauan politik antara

---

<sup>22</sup> Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).



Pemerintah Belanda dengan bangsawan atau penguasa lokal. Hal ini disebabkan karena hilangnya reputasi penguasa lokal ketika Belanda memegang kendali penuh di wilayah yang awalnya adalah wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu para penguasa lokal ini melakukan perlawanan melalui gerakan perampokan di berbagai wilayah. Namun, aksi-aksi tersebut diredam oleh Pemerintah Belanda melalui kekuatan militer.

Para bangsawan yang menentang pemerintahan Belanda tersebut dipenjara atau bahkan diasingkan. Sedangkan bangsawan lainnya yang bersedia bekerja sama dengan Belanda akan diperbaiki kedudukannya. Bangsawan yang kooperatif terhadap Pemerintah Belanda tersebut menjadi alat Belanda dalam menciptakan lingkungan kondusif di Makassar. Tantangan Pemerintah Belanda selanjutnya adalah ketika memberikan kewenangan lebih kepada *controleur*. *Controleur* sebagai garda terdepan dalam tengah-tengah masyarakat pribumi memegang sumber pendapatan kolonial kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat.

Kewenangan *controleur* tersebut melahirkan sikap ketergantungan antara pejabat bumiputra dengan *controleur*. Pihak terakhir berusaha memenuhi keinginan pihak pertama. Sebaliknya, pihak terakhir memberikan jaminan dan kebebasan kepada pihak kedua agar dapat memenuhi keinginan pihak pertama. Olehnya, manipulasi tersebut menjadi akar munculnya masalah-masalah baru dalam Pemerintahan Belanda di Makassar.

Dalam karya tersebut berfokus pada dinamika politik di Makassar sejak diterapkannya sistem pemerintahan modern Belanda. Dinamika politik ini terjadi



antara Pemerintah Belanda, bangsawan yang menentang Belanda, pejabat bumiputra, dan masyarakat lokal. Dinamika tersebut kemudian berujung pada gerakan-gerakan masyarakat yang menentang manipulasi dan dominasi Pemerintah Hindia-Belanda. Relevansi karya ini terhadap penelitian penulis yaitu dapat menjadi sumber acuan untuk mengetahui relasi pemerintah kolonial dengan masyarakat lokal.

Kajian yang relevan lainnya adalah karya dari S.L. van der Wal berjudul *Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*.<sup>23</sup> Menariknya buku ini adalah merupakan hasil kumpulan tulisan dari 12 mantan B.B. (*Binnenlands Bestuur*) yang pernah bertugas di Hindia-Belanda. Kesuluruhan B.B. tersebut telah berusia 70 tahun ke atas namun, deskripsi mereka masih jelas dan menarik. Dari kumpulan kenang-kenangan tersebut membahas berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Buku ini menggambarkan kondisi sosial masyarakat di wilayah kerjanya. Salah satu bab yang dituliskan oleh H.J. Koerts mantan B.B. di Sulawesi Selatan menuliskan tentang hubungan antara masyarakat lokal dengan Pemerintah Belanda. Koerts menjadi *controleur ter besichikking* (kontrolir yang diperbantukan) untuk urusan adat pada tahun 1938 di wilayah *afdeeling* Makassar. Dalam uraiannya

---

<sup>23</sup> S. L. van der Wal. *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*.

(Jakarta: Perwakilan KITLV dan Djambatan Anggota IKAPI, 2001).



menjelaskan dengan cukup jelas hubungannya dengan masyarakat biasa dan bangsawan hingga kedatangan Jepang. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi sebuah referensi penting untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan B.B. di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya adalah skripsi yang dituliskan oleh Agung Wibowo dari Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia berjudul *Gaya Hidup Masyarakat Eropa di Batavia Pada Masa Depresi Ekonomi (1930-1939)*.<sup>24</sup> Karya ini menuliskan tentang gaya hidup masyarakat eropa di Batavia pada masa depresi ekonomi. Agung melihat gaya hidup tersebut dengan berbagai aspek yaitu dari pakaian, aktivitas keseharian, serta perkembangan teknologi dalam masyarakat.

Pada saat depresi ekonomi melanda Hindia-Belanda yang akarnya dari Amerika Serikat, mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat disebabkan karena kondisi keuangan yang sulit. Kondisi masyarakat kota di Batavia sebagai pusat pemerintahan harus beradaptasi dengan masalah tersebut. Kebijakan devaluasi yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda dianggap gagal karena dalam kenyataannya tidak mungkin menurunkan biaya dan pengeluaran sesuai dengan menurunnya hasil produksi dan pemasukan. Perkembangan proses produksi yang sangat cepat dengan hasil yang bertambah besar serta upah yang sangat rendah, memerlukan penyesuaian terhadap hak-hak penduduk.

---

<sup>24</sup> Agung Wibowo. *Gaya Hidup Masyarakat Eropa Di Batavia Pada Masa Depresi Ekonomi Tahun 1930-1939*. (Depok: Universitas Indonesia, 2012).



Di sisi lain, masyarakat Eropa yang mendapat hak Istimewa karena berada pada golongan atas terkesan tenang-tenang saja menghadapi masa depresi, disbanding dengan pribumi yang merasakan dampak dari pengurangan tenaga kerja di perusahaan serta gaji yang diturunkan. Oleh karena itu, karya ini menguraikan beberapa gaya hidup masyarakat Eropa ditengah depresi ekonomi seperti gaya berpakaian dan kaum pesolek, aktivitas keseharian dan kebiasaan unik, serta kegiatan hiburan masyarakat Batavia. Olehnya, karya ini menjadi sebuah referensi penting untuk memberikan sebuah gambaran gaya hidup masyarakat Eropa di luar Sulawesi Selatan.

### 1.5.2. Landasan Konseptual

#### A. Kehidupan Sehari-hari (*Daily Life*)

Kehidupan sehari-hari adalah rangkaian aktivitas, rutinitas, dan interaksi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini mencakup berbagai aspek seperti pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, rekreasi, interaksi sosial, dan berbagai tanggung jawab serta kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari kehidupan rutin seseorang. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan *Daily Life History* adalah sejarawan Jerman Bernama Alf Ludtke. Ia menjelaskan bahwa sejarah tidak hanya tentang tokoh-tokoh besar atau peristiwa penting, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bekerja dan berinteraksi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Alf Ludtke, "What is the History of Everyday Life and Who Are Its Practitioners?", dalam Alf Ludtke, *The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life*. (Princeton: Princeton University, 1995), hlm. 3



## B. Kolonial

Menurut *Oxford English Dictionary* (OED) kata ‘kolonial’ berasal dari ‘colonial’ yang berarti ‘pertanian’ atau ‘pemukiman’, dan mengacu pada orang Romawi yang menetap di negeri lain namun, masih mempertahankan kewarnanegaraannya. Oleh karena itu, OED menggambarkan sebagai;

*“pemukiman di negara baru... sekumpulan orang yang menetap di wilayah baru, membentuk suatu komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara induknya; komunitas yang terbentuk, terdiri dari para pemukim asli beserta keturunan dan penerusnya, sepanjang hubungan dengan negara induk tetap terjaga.”*

Sedangkan Ania Loomba menyimpulkan definisi ‘kolonial’ adalah penaklukan dan penguasaan atas tanah dan barang milik orang lain.<sup>26</sup> Namun, kolonial dalam pengertian ini bukan sekedar ekspansi berbagai kekuatan Eropa ke Asia, Afrika, atau Amerika tetapi hal ini telah menjadi ciri yang berulang dan tersebar luas dalam sejarah manusia.

### 1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian sejarah merupakan proses seorang sejarawan merekonstruksi sebuah peristiwa di masa lampau bertopang pada data yang diperoleh melalui tahapan analisis, pengujian dan seleksi secara kritis. Hasil

---

<sup>26</sup> Ania Loomba. *Colonialism/Postcolonialism*. (New York: Routledge, 1988)



penelitian kemudian dianalisis untuk proses pengambilan kesimpulan. Metode penelitian sejarah sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan. sejarah. Meskipun terbagi menjadi beberapa tahap, tiap tahapannya memiliki keterkaitan erat. Untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya. Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ini.

*Pertama* adalah pemilihan topik terkait *Binnenlands Bestuur* atau pejabat administrasi Belanda, sistem pemerintahan modern, relasi antara pejabat Belanda dengan masyarakat lokal, kolonialisme Belanda di Sulawesi Selatan pada abad-20, serta peristiwa sejarah relevan lainnya sebagai bahan refleksi historis. *Kedua* adalah pengumpulan sumber primer yang dilakukan melalui penelusuran secara *online* melalui situs penyedia arsip digital. Situs-situs tersebut seperti Delpher, Nationaal Archief, Khastara Perpustnas, Sidak Monumen Pers, dan Kranten Bank Zealand.

Adapun sumber-sumber sekunder yang menjadi penunjang dalam penelitian ini berupa buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ditelusuri oleh penulis di, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta beberapa *e-book* dari situs internet yaitu DBNL, Google Cendikia, JSTOR, dan Research Gate.

*Ketiga*, menganalisis sumber kepustakaan yang diperoleh. Pada tahap ini penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang penulis kumpulkan. Tahapan ini berguna untuk menentukan apakah sumber yang diperoleh dapat digunakan atau tidak. Pada sumber primer, kritik dilakukan dengan dua cara yaitu



kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal ialah kritik yang menguji keabsahan sumber yang digunakan. Dengan cara ini penulis melihat apakah data yang ditemukan ini valid dan relevan dengan zamannya, dan apakah berita-berita yang dikeluarkan dilansir dari sumber yang resmi atau tidak. Kritik internal adalah kritik yang digunakan untuk menguji kredibilitas secara kritis terhadap konten dan substansi isi dari sumber tersebut. Proses kritik dilakukan seiring dengan proses menerjemahkan, sebab banyak sumber yang menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Belanda dan ada sumber yang sepenuhnya menggunakan Bahasa Belanda.

*Keempat*, melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikritik. Pada tahap ini penulis berusaha menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta dari sumber yang telah dikumpulkan secara kronologis kemudian direkonstruksikan menjadi sebuah kesimpulan (sintesis). Tantangan yang penulis temui dalam tahap ini ialah ada beberapa sumber yang pembahasannya terputus atau tidak lengkap dan beberapa istilah yang sulit ditafsirkan maknanya. Dengan demikian, data yang kurang mencukupi tersebut tidak penulis masukkan dalam pembahasan di penelitian ini.

Kelima adalah penulisan sejarah. Ini merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis menarasikan hasil analisis dari semua tahap yang telah dilewati dengan cara menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin sebagai sebuah tulisan sejarah. Penulis dituntut untuk meneliti, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa di masa lampau secara kronologis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan, mendeskripsikan secara analisis serta



menafsirkan tentang kehidupan *binnenlands bestuur* di Sulawesi Selatan pada tahun 1909-1942.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penyusunan karya tulis yang berjudul *Kehidupan Binnenlands Bestuur Pada Masa Kolonial di Sulawesi Selatan, Tahun 1909-1942*, penulis akan menyusun dalam lima bagian yang dimuat secara sistematis. Berikut ini gambaran dalam setiap babnya:

- Bab I berisi gambaran umum mengenai alasan penulis mengambil tema dan judul penelitian ini. Dalam bab I penulis juga memaparkan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka yang menunjang data untuk penulisan karya tulis ini
- Bab II berisi gambaran umum Sulawesi Selatan pada abad ke-20. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang transisi sistem pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan modern Belanda, kondisi sosial dan ekonomi, serta modernisasi dan perubahan gaya hidup.
- Bab III akan membahas tentang kehidupan sehari-hari *binnenlands bestuur* dan relasinya dengan bangsawan lokal. Pada bab ini penulis akan merekonstruksikan hubungan antara *binnenlands bestuur* dengan bangsawan melalui kehidupannya sehari-hari.
- Bab IV akan membahas tentang kehidupan sehari-hari *binnenlands bestuur* dan relasinya dengan masyarakat lokal. Dalam bab ini, penulis akan menuliskan tentang kehidupan sehari-hari *binnenlands bestuur* dengan masyarakat lokal.



- Bab V adalah hasil dari penjabaran ke-empat bab sebelumnya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan dalam tulisan tersebut. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah yang telah penulis ajukan, sekaligus merupakan penutup dari penulisan karya ini.



## BAB II

### Gambaran Umum Kondisi Sosial dan Politik di Sulawesi Selatan

Kondisi sosial dan politik di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh kedatangan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan politik ekspansif di wilayah tersebut. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Sulawesi Selatan sudah memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, berlandaskan pada sistem feodal yang mengakar pada adat istiadat lokal. Kekuasaan politik dan sosial didominasi oleh elit lokal melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Gowa, Tallo, Bone, dan Wajo. Meskipun telah ada ketegangan dengan pengaruh asing, masyarakat setempat tetap mempertahankan otonomi mereka melalui hierarki politik tradisional yang berlaku secara turun-temurun.

Namun, kedatangan Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengubah dinamika ini secara signifikan. Belanda, melalui kebijakan politik dan militer, mulai mempengaruhi struktur pemerintahan lokal dengan memperkenalkan sistem indirect rule yang pada awalnya mengandalkan kerja sama dengan penguasa lokal, termasuk raja-raja dan bangsawan. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, Belanda mulai melakukan integrasi langsung terhadap kekuasaan kolonial, menjadikan penguasa lokal hanya sebagai bagian dari sistem pemerintahan kolonial yang lebih besar. Proses ini, yang dikenal sebagai pasifikasi politik, membawa perubahan besar pada kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Selatan,



dengan dampak yang terasa oleh masyarakat setempat hingga beberapa dekade setelahnya.

Dalam bab ini, akan membahas tentang bagaimana Belanda berhasil menaklukkan dan menguasai kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan melalui serangkaian langkah diplomatik dan militer, serta bagaimana strategi kolonial ini mempengaruhi struktur kekuasaan lokal dan menandai awal dari perubahan besar dalam tatanan sosial-politik daerah ini.

### **2.1. Pasifikasi Politik Belanda di Sulawesi Selatan**

Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki sistem pemerintahan feodal yang terstruktur dan tertata dengan baik. Sistem ini didasarkan pada hierarki kekuasaan tradisional yang mengakar pada adat istiadat lokal. Dalam sistem ini, kekuasaan politik dan sosial berada di tangan elit lokal, yang memerintah melalui hubungan patron-klien dengan masyarakat umum. Sistem pemerintahan feodal di Sulawesi Selatan berpusat pada kerajaan-kerajaan besar seperti Gowa, Tallo, Bone, dan Wajo. Setiap kerajaan memiliki struktur pemerintahan tersendiri, tetapi pada dasarnya sistem tersebut mengikuti pola hierarkis yang sama.

Terdapat tiga struktur lapisan pemerintahan di Sulawesi Selatan yaitu *pertama* Raja (*Arung* atau *Karaeng*) dalah pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Ia tidak hanya memegang kekuasaan politik, tetapi juga berfungsi sebagai simbol legitimasi adat dan spiritual masyarakat. Kekuasaan raja biasanya diturunkan secara turun-temurun dalam garis keluarga bangsawan tertentu. *Kedua*, adalah Dewan Adat yaitu terdiri dari bangsawan dan tokoh adat berpengaruh. Dewan ini, seperti



*Ade' Pitue* di Bone atau *Bate Salapang* di Gowa, bertugas memberikan nasihat kepada raja dan kadang-kadang memiliki wewenang untuk mengontrol keputusan raja jika dianggap menyimpang dari adat atau kepentingan masyarakat luas.<sup>1</sup> Pemimpin Wilayah (*Punggawa* dan *Gallarang*) yaitu bertugas mengelola daerah tertentu, seperti distrik atau desa. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pengawasan produksi pertanian, dan penegakan hukum adat. *Gallarang*, misalnya, adalah pejabat yang mengelola wilayah kecil seperti desa atau perkampungan.<sup>2</sup>

Kemudian pada saat kedatangan Belanda sistem pemerintahan kolonial pada awalnya menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat *indirect rule* atau sistem pemerintahan tidak langsung agar kedudukan struktur sosial masyarakat tetap berjalan dengan efektif.<sup>3</sup> Oleh karena itu Belanda menerapkan dua bentuk sistem pemerintahan yaitu pemerintahan pribumi dipimpin oleh raja dan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Andaya, Leonard Y. *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, hlm. 45.

<sup>2</sup> Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985, hlm. 63.

<sup>3</sup> Ummu Faradillah. 2018. *Munculnya Elit Birokrasi Kolonial Di Sulawesi Selatan*. (Makassar: Universitas Hasanuddin), hlm. 6



sipil dipimpin oleh Belanda.<sup>4</sup> Model pemerintahan ini disebut oleh J.S Furnivall dengan sistem pemerintahan politis dan administratif.<sup>5</sup> Setelah pembentukan konfederasi oleh pemerintah Hindia Belanda maka lahirlah pemisahan antara bangsawan pusat dengan bangsawan daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian pada awal abad ke-20, Kolonial Belanda nampaknya menginginkan kekuasaan lebih yaitu dengan menguasai penuh pemerintahan di seluruh wilayah. Ada tiga alasan Belanda melakukan hal tersebut yaitu *pertama* Untuk menciptakan keamanan sebagai modal untuk menarik pemodal asing menanamkan modalnya di daerah ini. *Kedua*, untuk menguasai daerah-daerah yang dari segi ekonomi berpotensi untuk maju. *Ketiga*, mencegah adanya pengaruh luar yang ingin menanamkan kekuasaannya di daerah ini.<sup>6</sup>

Untuk menguasai secara penuh wilayah Sulawesi Selatan, awalnya Belanda melakukan diplomasi dengan pihak kerajaan-kerajaan. Dalam proses tersebut, Belanda menginginkan para kerajaan tersebut untuk menandatangani *Korte Verklaring* atau Perjanjian Pendek. Perjanjian tersebut berisi bahwasannya pihak penguasa kerajaan berjanji untuk mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda

---

<sup>4</sup> A.A. Gde Putra Agung. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional ke Kolonial*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 3

<sup>5</sup> J.S. Furnivall. 2009. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. (Jakarta: Freedom Institut), hlm. 274

<sup>6</sup> Edward Poelinggomang, Dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), hlm. 14



atas wilayahnya dan menunjukkan kesetiaan serta ketaatan terhadap semua peraturan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, penguasa lokal juga sepakat bahwa musuh pemerintah adalah musuh mereka, dan sahabat pemerintah adalah sahabat mereka pula.<sup>7</sup>

Proses penawaran penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung sangat singkat hanya beberapa hari saja. Kemudian penguasa lokal merespon hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Kolonial. Oleh karena itu, demi mencapai tujuannya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Heutz telah menyiapkan dan melaksanakan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Ekspedisi militer ini dikenal dengan nama "Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905" (*Zuid Celebes Expeditie 1905*).

. Ekspedisi ini dipimpin oleh Van Heutsz sendiri, yang sebelumnya berhasil menaklukkan Aceh dan dikenal sebagai ahli strategi militer yang cakap. Pasukan kolonial, yang didukung oleh persenjataan modern dan logistik yang lebih unggul, dengan cepat mengalahkan perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Bone.<sup>8</sup> Kerajaan Bone dipilih sebagai sasaran pertama karena meskipun statusnya sebagai kerajaan pinjaman, kerajaan ini menolak tuntutan pemerintah kolonial untuk menyerahkan kekuasaan dan tunduk pada Belanda. Sikap Raja Bone, La Pawawoi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>8</sup> Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, (Stanford: Stanford University Press, 2008), hlm. 176-177.



Karaeng Segeri (1895-1905), menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki pengaruh luas dan dukungan dari beberapa kerajaan sahabat. Jika Kerajaan Bone berhasil dipaksa menyerah dan menandatangani pernyataan pendek, kerajaan-kerajaan lain diharapkan akan lebih mudah ditaklukkan.

Kolonel van Loeren, setelah armada berkumpul, mengirim utusan dengan surat tuntutan yang mencakup tiga hal: pertama, penguasa kerajaan harus menandatangani akte penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda; kedua, menyetujui kompensasi untuk penarikan pajak impor dan ekspor; dan ketiga, mengakui hak Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di sana. Tuntutan ini harus dipenuhi dalam waktu 2 kali 24 jam, jika tidak, akan dilakukan serangan. Karena tuntutan ini ditolak, pada dini hari 21 Juli 1905, militer Belanda mulai menyerang. Tanggal ini menandai awal tindakan militer Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905.

Serangan tersebut menghadapi perlawanan keras dari laskar Bone, yang mendapat bantuan dari kerajaan Gowa, Soppeng, dan Wajo. Bantuan ini telah diperhitungkan oleh Belanda, sehingga seluruh pasukan ekspedisi dipusatkan untuk menyerang Bone, dengan harapan kemenangan akan memudahkan penaklukan kerajaan-kerajaan lainnya. Perang berlangsung hingga September 1905, menyebabkan banyak korban dan akhirnya Belanda berhasil menguasai Bone meskipun Raja Bone telah mengungsi. Upaya untuk menangkap Raja Bone gagal,



sehingga pasukan memaksa anggota *Ade Pitu* (dewan hadat kerajaan) untuk menandatangani pernyataan pendek pada September 1905.<sup>9</sup>



**Gambar 2.1. La Pawawoi Arung Segeri (Raja Bone 1895-1905) dalam keadaan luka pada kaki sebelah kiri digendong turun dari rumah penduduk saat ditangkap tanggal 18 Nopember 1905 dan dibawa ke Pare-pare, selanjutnya diasingkan ke Bandung tanggal 14 Desember 1905.**

(Sumber: <http://nurkasim49.blogspot.hu>)

Setelah Bone dikuasai, aksi militer dilanjutkan ke kerajaan-kerajaan lain seperti Gowa, Luwu, Sidenreng, Tanete, Barru, Suppa, dan lainnya. Kebanyakan penguasa lokal menolak tuntutan, sehingga tindakan militer terus dilancarkan. Hanya beberapa kerajaan kecil yang langsung menerima dan menandatangani pernyataan pendek, seperti Kerajaan Tanete, Maiwa, Enrekang, dan Kassa, karena

---

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Poelinggomang., hlm. 18



mereka melihat bahwa kerajaan besar dan kuat saja tidak mampu menghadapi agresi militer Belanda.

Kedatuan Luwu juga menolak tuntutan Belanda dan diserang. Meskipun melakukan perlawanan, kedatuan ini akhirnya diduduki oleh Belanda dan Datu Luwu, We Kambo Daeng Risompa (1901-1905) beserta dewan Hadatnya terpaksa menandatangani pernyataan pendek pada 19 September 1905. Kerajaan Gowa juga menghadapi tindakan serupa. Tuntutan terhadap Raja Gowa, Sultan Husain I Makkulau Karaeng Lembangparang (1995-1905), ditolak, dan kerajaan ini diserang pada 18 Oktober 1905. Pasukan Belanda mematahkan perlawanan, namun tidak berhasil menangkap raja. Raja Gowa mengungsi ke Barru dan berencana melarikan diri ke Sidenreng. Karena gagal menangkap raja, gubernur Kroesen memaksa tumailalang towa dan dewan Bate Salapang untuk menandatangani pernyataan pendek pada 18 Desember 1905.<sup>10</sup>

Setelah menduduki kerajaan-kerajaan besar dan kuat, kerajaan-kerajaan kecil pada umumnya tidak melakukan perlawanan berarti. Meskipun beberapa bangsawan lokal berusaha melawan, perlawanan mereka tidak dapat menandingi keunggulan militer Belanda. Strategi Belanda tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melibatkan manipulasi politik dengan memanfaatkan konflik internal antar-kerajaan. Belanda juga menjanjikan konsesi kepada elite lokal yang bersedia bekerja sama, sebuah pendekatan yang mempercepat proses pasifikasi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 19



Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda menganggap telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Selatan pada 31 Desember 1906.<sup>11</sup>

Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan beberapa kebijakan penting. Pertama, Makassar ditetapkan sebagai kotamadya (*gemeente stad*) pada 1 Juli 1906. Kedua, rencana pembatalan status pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 1906, dan mengubahnya menjadi pelabuhan wajib pajak (*tol gebied*). Kebijakan ini bertujuan untuk membendung kegiatan perdagangan maritim dari Sulawesi Selatan ke pelabuhan asing dan memperkuat posisi pelayaran niaga yang dikelola oleh KPM, yang telah memperluas jalur pelayarannya dan menguasai perdagangan maritim. Dengan pengalihan pusat kegiatan perdagangan dari Makassar ke Semarang dan Surabaya, pemerintah Hindia Belanda memastikan pengendalian lebih besar atas wilayah Sulawesi Selatan.<sup>12</sup>

Penaklukan Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1905 menjadi salah satu momen kunci dalam proses kolonialisasi di wilayah tersebut. Kampanye militer yang sistematis, strategi politik yang cerdas, dan penggunaan kekuatan ekonomi menjadikan pasifikasi ini berhasil dari sudut pandang kolonial. Namun, bagi masyarakat lokal, peristiwa ini menandai hilangnya kedaulatan politik kerajaan-kerajaan besar yang telah berabad-abad menjadi simbol kekuatan Sulawesi Selatan.

---

<sup>11</sup> Sutherland, Heather, *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*, (Singapore: Heinemann, 1979), hlm. 142.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Poelinggomang, hlm 20



## 2.2. Kondisi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan Pasca Penaklukan

Peristiwa penaklukan penguasa lokal Sulawesi Selatan tahun 1905 atau dikenal dengan Ekspedisi Militer Belanda merupakan luka yang mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Pasca peristiwa tersebut kedua kerajaan raksasa Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa telah takluk. Kemudian disusul dengan penaklukan di beberapa kerajaan-kerajaan lainnya meskipun status kerajaannya masih merdeka atau telah terikat perjanjian persahabatan maupun yang telah mengakui kekuasaan Belanda.<sup>13</sup> Dengan demikian Belanda secara penuh memegang kendali kekuasaan di wilayah ini sehingga bangsawan lokal tak lagi memiliki pengaruh yang kuat.

Peristiwa ini membawa dampak besar pada struktur sosial masyarakat lokal. Bangsawan lokal, yang sebelumnya menjadi simbol otoritas dan penjaga nilai adat seperti *siriq* (kehormatan) dan *pesse* (solidaritas), dihadapkan pada dilema besar yaitu menerima kekuasaan kolonial atau melanjutkan perlawanan yang keduanya memiliki risiko besar. Oleh karena itu, satu sisi bangsawan memilih bekerja sama dengan Belanda demi keberlangsungan hidupnya. Kemudian di sisi lain, mereka tetap melakukan perlawanan meski tidak membuahkan hasil yang berarti.

---

<sup>13</sup> Muhammad Abduh. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumen Sejarah Nasional), hlm. 22



### 2.2.1. Ambtenaar Bumiputra dan Pendidikan Kolonial

Bangsawan yang memilih bekerja sama dengan kolonial sering kali mendapatkan keuntungan, seperti akses ke pendidikan Barat dan peluang ekonomi. Namun, kerja sama ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dalam *Reisherinneringen van Een Bestuurambtenaren in Zuid-Celebes*, L.M. Klaveren mencatat bagaimana banyak bangsawan menggunakan posisi mereka untuk memperluas kekayaan pribadi, tetapi kehilangan hubungan emosional dengan rakyat mereka.<sup>14</sup> Meskipun hal tersebut terkesan dilematis namun, sebagian bangsawan harus memilih jalan ini demi sebuah kepentingan.

Salah satu bentuk kerja sama antara Belanda dengan bangsawan lokal tersebut adalah menjadi *Ambtenaar*. Kata '*Ambtenaar*' berasal dari bahasa Belanda, dalam terjemahannya berarti pegawai negeri, orang yang ditunjuk dan digaji oleh Pemerintah Belanda.<sup>15</sup> Para calon *Ambtenaar* baik itu dari kalangan pribumi ataupun bangsawan akan menempuh pendidikan kolonial sebagai bekal mereka dalam melakukan pekerjaannya.<sup>16</sup> Kemudian posisi atau jabatan mereka cukup beragam tergantung wilayah tempat asalnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kolonial. Jabatan tertinggi merupakan Kepala Distrik atau Kepala

---

<sup>14</sup> L.M. van Klaveren. 1918. *Reisherinneringen van Een Bestuurambtenaren in Zuid-Celebes*. (Leiden: Universiteit Leiden)., hlm. 27

<sup>15</sup> Heather Sutherland., Terj. Sunarto, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983)., hlm. 22.

<sup>16</sup> Sarkawi B. Husain., *Sejarah Sekolah Makassar* (Makassar: Innawa, 2015) hlm. 130.



Kampung. Beberapa di antaranya yang terpilih untuk mewakili etnisnya dapat berpartisipasi dalam *gemeenteraad*.<sup>17</sup> Sebagian lainnya bekerja sebagai petugas pelayanan publik, seperti di pengadilan, kantor pos, perusahaan air minum, dan lembaga pemerintah kolonial lainnya.<sup>18</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Kolonial membutuhkan peran bangsawan lokal untuk mengelola wilayah ini. Sebab, Belanda tidak dapat mengatur rakyat secara langsung tanpa melibatkan bangsawan lokal yang memiliki pengaruh besar di mata masyarakat.<sup>19</sup> Bagi Belanda, melibatkan bangsawan sebagai pegawai pemerintah memberikan keuntungan besar. Bangsawan adalah tokoh yang dihormati oleh masyarakat dan dianggap mampu menjembatani kepentingan Belanda dengan kebutuhan rakyat. Di sisi lain, para bangsawan melihat kerja sama ini sebagai cara untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka. Dengan

---

<sup>17</sup> *Gemeenteraad* atau Dewan Kota merupakan dewan yang memiliki kewajiban memberi masukan dan pertimbangan kepada *gemeente* terutama berkaitan dengan pembangunan kota. Lihat Purnawan, Basundoro. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012*. (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmaterra Publishing), hlm. 5.

<sup>18</sup> Bella, Astari. 2023. *Ambtenaar Bumiputra Di Makassar Tahun 1905-1942*. (Makassar: Universitas Hasanuddin)., hlm. 3

<sup>19</sup> Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Surrey: Curzon Press, 2000), hlm. 89



menjadi pegawai pemerintah, mereka tetap memiliki posisi penting di masyarakat, meskipun dalam kerangka sistem kolonial.<sup>20</sup>

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai *ambtenaar* terlebih dahulu mereka menempuh pendidikan kolonial. Adapun pendidikan formal untuk para calon *ambtenaar* bumputra tersebut adalah *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), yang didirikan di Makassar dan beberapa kota besar lainnya. OSVIA menawarkan pelatihan lanjutan untuk mempersiapkan siswa menjadi pegawai pemerintah di tingkat lokal. Di sekolah ini, siswa belajar tentang hukum kolonial, manajemen administrasi, serta teknik pengumpulan pajak dan pencatatan statistik.<sup>21</sup> Pelajaran-pelajaran tersebut dirancang untuk membekali para lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi.

Awalnya, sebagian besar murid sekolah kolonial berasal dari keturunan Melayu, Jawa, Manado, dan Ambon. Hanya sedikit orang Bugis-Makassar yang mau masuk ke sekolah-sekolah kolonial. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa bersekolah di lembaga pendidikan Belanda akan membuat mereka “dibelandakan” atau menjadi *ata* (budak) yang hanya melayani kepentingan kolonial.<sup>22</sup> Mungkin saja anggapan tersebut ada benarnya, karena pendidikan etis pada kenyataannya

---

<sup>20</sup> Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 56

<sup>21</sup> J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1988), hlm. 102

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, Sarkawi, hlm.131



diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dengan biaya murah yang dipekerjakan di perkebunan atau kantor-kantor kolonial.<sup>23</sup> Namun, seiring waktu, keadaan ini berubah, dan kelompok bangsawan pun mulai terlibat dalam birokrasi modern. Hal tersebut dapat dilihat dari *Regering Almanak van Nederlandsch-Indie* yang melampirkan banyak nama-nama bumiputra menduduki jabatan dalam birokrasi Pemerintah Kolonial.<sup>24</sup>

Selain OSVIA, beberapa pendidikan kolonial lainnya juga didirikan seiring dengan dilaksanakannya kebijakan etis Pemerintah Kolonial yang di dalamnya memuat pengembangan pendidikan. Meski demikian, pada paruh abad ke-19, Masyarakat Sulawesi Selatan telah mengenal pendidikan formal Belanda yang didirikan oleh misionaris Belanda. Lembaga pendidikan tersebut bernama *Kweekschool* yang didirikan di Makassar pada tahun 1876 oleh Benjamin Frederik Matthes. Sekolah ini bertujuan melahirkan guru-guru dari kalangan pribumi. Namun, sekolah ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai "sekolah raja" karena sebagian besar muridnya berasal dari kalangan bangsawan lokal.<sup>25</sup>

Kemudian pasca pasifikasi politik Belanda, pada tahun 1907 pemerintah kolonial memperkenalkan *Volksschool*, atau sekolah desa, yang memberikan

---

<sup>23</sup> Agus Suwignyo., Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme, (Yogyakarta: Quantum Yogya, 2019), hlm. 113.

<sup>24</sup> Lihat *Regering Almanak van Nederlandsch Indie 1906-1942*.

<sup>25</sup> Sarita Pawiloy. 1981. Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 17-18



pendidikan dasar selama tiga tahun bagi masyarakat umum. Bahasa daerah digunakan sebagai pengantar utama, dengan sedikit pengajaran bahasa Belanda di tingkat akhir. Sekolah ini sering kali dihadapkan pada resistensi dari masyarakat lokal yang mencurigai motif kolonial di balik pendidikan tersebut. Bagi siswa yang melanjutkan, tersedia *Vervolgschool*, yang memberikan pelajaran tambahan selama dua tahun dengan penekanan pada keterampilan praktis dan pengenalan bahasa Belanda yang lebih intensif. Kemudian tingkatan terakhir adalah *Kweekschool* dan *Normaal School*.<sup>26</sup>



**Gambar 2.2. Duduk di depan (dari kiri): I-Tjoneng Karaeng Mandjalling, I-Mappanjukki, Hendrik van der Wal (Controller Gowa 1913-1916), Assisten Controller, I-Manngimangi, Karaeng Barangmamase, Bakeng (anak pelihara Karaeng Barangmamase). Berdiri di belakang (dari kiri): Karaeng Lembang Parang, Kadi Gowa, Karaeng Popo, Karaeng**

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pawiloy, hlm. 56-57



## Lengke, Karaeng Katapang (Karuwisi). Tempat di depan Kantor

### Onderafdeeling Gowa

(Sumber: <http://nurkasim49.blogspot.ie/2011/12/iii.>)

Sedangkan untuk golongan bangsawan, jenjang awal pendidikan mereka ditempuh di *Hollandsch Indische School* (HIS) yang didirikan tahun 1914. Sekolah ini dirancang untuk memberi pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anak pribumi, terutama dari golongan elit. HIS memberikan kurikulum yang lebih maju dibandingkan *Volksschool* dan *Vervolgschool*, dengan fokus pada penguasaan bahasa Belanda serta pelajaran akademik lainnya.<sup>27</sup> Kemudian siswa HIS dapat melanjutkan pendidikan mereka di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang didirikan di Makassar pada tahun 1930. MULO bertujuan mendidik pribumi khususnya bangsawan untuk menjadi tenaga kerja administrasi menengah yang dapat bekerja dalam pemerintahan kolonial maupun sektor swasta, seperti perusahaan dagang dan perkebunan. Selain MULO, lulusan HIS juga dapat melanjutkan pendidikannya di OSVIA dan *Hollandsch Indische Kweekschool*.<sup>28</sup>

Adanya pendidikan kolonial ini membawa perubahan besar dalam struktur masyarakat. Pendidikan ini awalnya dirancang untuk mencetak tenaga administrasi atau ambtenaar dari kalangan pribumi yang dapat membantu menjalankan pemerintahan kolonial. Namun, dampaknya meluas hingga ke berbagai aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 60



Salah satu dampak utama adalah terciptanya kelompok elite baru di masyarakat. Anak-anak bangsawan yang bersekolah di lembaga-lembaga seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) memperoleh pendidikan yang mempersiapkan mereka untuk menjadi pegawai pemerintah. Para lulusan sekolah ini tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda, yang menjadi simbol status sosial tinggi. Hal ini memberikan mereka akses ke jabatan penting dalam pemerintahan dan meningkatkan posisi mereka dalam Masyarakat.<sup>29</sup>

#### 2.2.2. Gerakan Perlawanan Terhadap Pemerintah Kolonial

Bagi bangsawan yang tetap melakukan perlawanan biasanya berbentuk gerakan perampokan, penjarahan, dan balas dendam. Gerakan tersebut dilakukan di daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan keresahan ditengah masyarakat. Bentuk gerakan perlawanan tersebut dikategorikan oleh Belanda sebagai kriminalitas sehingga Pemerintah Kolonial seringkali resah karena jumlah gerakan tersebut memerlukan gerakan militer untuk meredamnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kolonial memberikan julukan wilayah ini sebagai *De Onrust Eiland* yang berarti Pulau Keonaran.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>30</sup> Amrullah Amir., “Melihat Sejarah Sosial di Makassar Melalui Roman dan Cerpen Karya H.J. Friedericy.” dalam Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 7 Juli 2011.



Sepeti yang dijelaskan sebelumnya, gerakan perampokan ini merupakan ajang bagi bangsawan untuk menunjukkan keberanian, kehebatan, dan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan *Gouvernement* Kroesen gerakan perlawanan sangat masif yang berupa pencurian ternak, gerombolan perampok, dan perlawanan politik. Gerombolan tersebut disertai dengan persenjataan yang dipimpin oleh I Tolo Daeng Magassing. Sehingga pada tahun 1906 H.N.A. Swart ditunjuk menjadi *Gouvernement* dan menanggung beban sebagai pembawa keamanan di Sulawesi Selatan.<sup>31</sup> Namun, Swart menanggapi hal tersebut bukan sebagai gerakan perlawanan, melainkan hanya sebuah gerombolan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup> Namun, meskipun demikian Swart tetap menerapkan kebijakan keamanan untuk mencegah gerakan-gerakan yang tidak diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat dari laporan serah jabatan Swart menyatakan bahwa distribusi militer dilakukan diberbagai daerah rawan seperti di Pangkajene dan Mandar.<sup>33</sup>

I Tolo Daeng Magassing merupakan mantan kepala satuan pasukan Kerajaan Gowa dan memiliki pengikut dari kalangan bangsawan ternama Kerajaan Gowa dan masyarakat.<sup>34</sup> Awalnya, gerakan I Tolo beranggotakan antara 8 sampai 10

---

<sup>31</sup> S.L. Van der Wal. 2001. *Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. (Jakarta: Penerbit Djambatan)., hlm. 49

<sup>32</sup> *Op.Cit.*, Poelinggomang hlm, 60

<sup>33</sup> Nationaal Archief, Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963), Nomor Inventaris Arsip 2.10.39, Inventaris Nomor 281, hlm. 32

<sup>34</sup> *Op.Cit.* Amrullah Amir



orang yang menjalankan aksinya di bagian Selatan Afdeling Makassar dan Bonthain. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengikut I Tolo semakin bertambah dikarenakan beredarnya kabar bahwa tingkat keamanan Belanda semakin melemah.<sup>35</sup>

Barulah pada masa pemerintahan *Gouvernement* W. J. Coenen gerakan militer secara masif dilakukan untuk membasmi gerakan perampokan. Bahkan Coenen meminta mengirim pasukan dari Jawa ke Sulawesi Selatan untuk meredam gerakan tersebut. Di tangan Coenen, gerakan perampokan tersebut dapat diredam. Hal ini dilaporkan oleh Coenen dalam *Kolonial Verslag* bahwa tingkat perampokan yang terjadi menurun khususnya di wilayah Takalar dan di Jenepono.<sup>36</sup> Puncaknya, Macan Daeng Barani berhasil tertembak hingga tewas di Kampung Bategalung pada tanggal 19 Oktober 1914.<sup>37</sup> Macan Daeng Berani merupakan salah satu dari bangsawan ternama Kerajaan Gowa yang merupakan pengikut dari I Tolo. Kematianya menjadi pemicu lahirnya gerakan perlawanan dari masyarakat dan keluarga kerajaan sebagai bentuk balas dendam.

Di bagian barat Sulawesi Selatan, gerakan perampokan dilakukan oleh La Djalante yang merupakan seorang anak laki-laki dari *aru matoa* Wajo. Sejak ekspedisi militer Belanda berhasil menaklukkan seluruh Kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Wajo, La Djalante melakukan perampokan di berbagai

---

<sup>35</sup> *Op.Cit.*, Van der Wal., hlm. 51

<sup>36</sup> *Kolonial Verslag (1915)*, hlm. 44

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, Poelinggomang, hlm. 60



pedalaman bugis selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan Coenen menyebutnya sebagai “bajingan tengik” disebabkan karena ia tak segan-segan mengubur hidup-hidup masyarakat yang kooperatif dengan kebijakan Belanda.<sup>38</sup> Namun, La Djalante berhasil ditangkap pada tahun 1911 dan diasingkan ke Pulau Jawa selama 20 tahun lamanya.<sup>39</sup>

Pada tanggal 19 Juni 1915, pada masa pemerintahan *Gouvernement* Th. A. L. Heyting (1913-1916) tingkat keamanan di wilayah Sulawesi Selatan semakin meningkat. Terlebih lagi pada tanggal 17 November 1915, I Tolo Daeng Magassing berhasil ditangkap bersama dengan para pengikutnya oleh Belanda di Kampung Kalanipa.<sup>40</sup> Heyting juga berhasil merebut perhatian bangsawan lainnya seperti Karaeng Mappanyukki, Karaeng Bontonompo, Karaeng Batupute, Karaeng Bontolangkasa, dan Karaeng Barombong. Para bangsawan tersebut juga terlibat dalam meredam gerakan perampokan.<sup>41</sup> Sehingga seluruh perlawanan terbuka berhasil diakhiri dan beralih ke bentuk perlawanan yang lainnya.

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, Van der Wal, hlm. 51-52

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>40</sup> Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar, 1906-1942*. (Yogyakarta: Ombak) hlm. 173

<sup>41</sup> Nationaal Archief, Inventaris van de Memories van Overgave, 1852-1962 (1963), Nomor Inventaris Arsip 2.10.39, Inventaris Nomor 281, hlm. 40